

Semn, 25 Juni 2018

Menyoal Kembali Hubungan Pers, Pemerintah, dan Masyarakat

Oleh: Nurudin

Beberapa waktu lalu kita dikagetkan dengan adanya sekelompok massa yang mengguyur kantor Radar Bogor karena protes pemberitaan. Tidak ada berita awal dari pihak benta "Ongkang-ongkang Dupa Rp 112 Juta" di media tersebut. Tak pelak lagi, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ikut menggecam aksi tindakan massa di atas.

Kasus di atas mengingatkan kita untuk kembali membahas hubungan trikotomi antara pers, pemerintah dan masyarakat. Namanya juga hubungan trikotomi yang sering tidak sering dan seralan tetapi sama-sama membutuhkan. Jika di kotomi itu dua pihak yang berseberangan, namun trikotomi itu tiga pihak yang saling berseberangan.

Trikotomi

Antara pers, pemerintah dan masyarakat tentu mempunyai dasar pijakan berbeda. Mereka mempunyai alasan sendiri dan tujuan sendiri, tetapi tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dalam perkembangannya, pemerintah berada di pihak yang paling berkuasa antar pers dan masyarakat. Alasannya, pemerintahlah yang mempunyai alat negara untuk bisa memaksa pers dan masyarakat selalu tunduk pada kemauannya.

Dalam kajian teori sistem dikatakan bahwa pers tunduk pada sistem pers dan sistem pers tunduk pada sistem politik. Sementara itu, sistem politik tersebut yang mempunyai adalah pemerintah. Jadi dalam posisi kekuasaan pers berada bawah posisi pemerintah. Ini diperkuat asumsi bahwa pemerintah juga memengaruhi pihak yang berkuasa. Sementara itu kekuasaan itu adalah sebuah cara pengelola

pengaruh agar orang lain menurut keinginan dan yang mempunyai kekuasaan itu adalah pemerintah yang mempunyai kekuasaan tersebut menguasai apa yang ada dalam masyarakat itu masuk pers dan juga masyarakat.

Aktualisasinya, kita bisa membandingkan pemerintah di Indonesia sejak negara ini berdiri. Berbagai kasus pembredelan pemerintah di era Orde Lama (Orla) dan Orde Baru (Orba) membuktikan bahwa kekuasaan pemerintah mempunyai kekuatan pemerintah.

Jadi pemerintah punya kekuasaan, sementara pers biasanya berniat untuk tidak hanyut menurut keinginan pemerintah secara membabi buta. Sementara itu masyarakat yang sebenarnya mempunyai kedaulatan penuh atas negara pada akhirnya kekuasaannya adikebir selendikan rupa. Masyarakat hanya dianggap punya kekuasaan saat dibutuhkan suaranya dalam Pemilihan Umum (Pemlu), setelah itu kekuasaannya hilang atau sengaja dihilangkan.

Jadi antara pemerintah, pers, dan masyarakat merupakan hubungan trikotomi dimana ketiganya mempunyai dasar pijakan berbeda dan sangat sulit untuk akar. Hubungan ketiganya bisa digambarkan dalam segitiga sama kaki dimana pemerintah berada di atas sementara ketiganya pemerintah mengunjak pers dan masyarakat.

Idealnya memang bukan hubungan segitiga sama kaki, tetapi segitiga sama sisi. Sementara itu posisi paling atas adalah pers sementara dua kaki lainnya pemerintah dan masyarakat. Mengapa? Karena pers dianggap sebagai penghubung kepentingan masyarakat dengan pemerintah atau sebaliknya.

Dalam posisi ini, media akan bisa

netral menghibungkan dirinya, bebas mengkritik pemerintah dan masyarakat, mendorong keduanya sama-pun mengawasinya tanpa takut dibredel. Namanya juga berposisi sebagai penghubung. Namun demikian, jalan sistem politik hal demikian tidak lebih gampang dilakukan karena pemerintah jelas mempunyai kepentingan untuk melanggengkan kekuasaan, bentuk pemerintahan apa pun.

Otoritarianisme Massa

Namun demikian, hubungan ketiganya juga bisa mengarah pada otoritarianisme massa. Artinya, kekuasaan massa sering berada pada posisi atas. Dengan kata lain, pers berada dalam tekanan massa. Segala aktivitasnya selalu berada dan harus sesuai dengan keinginan massa.

Apayang terjadi pada Radar Bogor menunjukkan indikasi kuat ke arah itu. Dengan penggeulogan massa ke kantor redaksi tersebut, segala aktivitas keredaksiannya tidak mau alam terpengaruh. Tekanan massa yang membat awak media tidak bekerja dengan leluasa sesuai koridor hukum masuk dalam "pembredelan" dalam lingkup yang ringan.

Tekanan pada pers juga pernah terjadi pada Harian Rakyat Merdeka. Sekelompok massa mendatangi kantor harian itu atas berita berjudul "Mulut Mega Ban Solar" (8/1/00), "Mega Lebih Cuman dan Sumantri" (8/1/00), dan "Mega Cuma Sekelas Bupati" (8/1/00). Akibatnya, Redaktur Eksekutifnya, Supriatman, divonis 6 bulan penjara karena dianggap menebarkan kebencian. Kasus ini pernah dikritik advokat senior almarhum Adnan Buyung Nasution bahwa apayang dilakukan pers sekadar upaya mengkritisi kebijakan politik.

Lalu, ada juga pendudukan kan-

tor Jawa Pos oleh sekelompok mahasiswa Gus Dur pada tanggal 15 April 1999 dan 7 Mei 2000. Mereka keberatan atas berita yang diterbitkan Jawa Pos 6 Mei 2000. Jawa Pos pernah menarunkan tulisan "Gus Dur Dieksek Sendiri oleh PBNU, Dianggap Mendua, Tak Boleh Ngomong Soal PKB" yang membuat marah massa Gus Dur (1999). Pendudukan ini secara tidak langsung akan mempengaruhi kerja media massa.

Penghukuman massa pada pers juga tidak dapat dikatakan mengarah pada otoritarianisme massa. Akan lebih parah lagi jika otoritarianisme ini berkaitan erat dengan kepentingan pemerintah. Jadi setelah tiga orang, massa menekan pers sementara pemerintah membarukan karena memang mempunyai kepentingan lainnya.

Massa bisa leluasa menekan karena secara psikologisnya mendapat dukungan secara tidak langsung dari pemerintah. Dengan kata lain, kerja pemerintah yang mengawasi pers untuk sesuai dengan keinginan diwakili oleh massa. Pers kritis, tidak disukai pemerintah, lalu massa yang bergerak.

Sebenarnya, tekanan pada media baik oleh pemerintah maupun masyarakat tidak boleh terjadi. Semua harus dikembalikan ke wilayah hukum. Jika tidak, kebebasan pers akan terancam dan pengembangan demokratisasi akan mengalami hambatan.

Kita jadi diingatkan kata-kata bapak Amerika Thomas Jefferson, "Jika saya harus memilih ada pers tanpa ada pemerintah dengan adapemerintahan-pada pers, tidak ragu men pilih saya akan memilih yang pertama."¹

Nurudin, Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Widyadarmas Malang (UMM), telah lama menulis buku Pers, Massa dan Sistem, Kemandirian Pers, dan Lainnya.